



Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia: Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya

Syafira Wyldania Aisyah Putri¹, Refti Handini Listyani²

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia^{1,2}

Email: syafira.22159@mhs.unesa.ac.id¹, reftihandini@unesa.ac.id²

ABSTRACT

Dalam industri hiburan Indonesia, fenomena pembatalan budaya menjadi masalah sosial yang kompleks. Ini terjadi di era digital, di mana pembatalan kolektif artis dan figur publik terjadi secara cepat dan massif melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana cancel culture dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai kolektif, dan dinamika kekuasaan di industri hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari sudut pandang sosiologi budaya dengan metode wawancara mendalam terhadap 15 informan (5 artis, 5 audiens, 5 pengamat industri), observasi partisipan di media sosial, dan analisis konten dokumen sekunder selama 6-12 bulan. Analisis tematik mengidentifikasi empat tema utama: (1) cancel culture sebagai kontrol sosial informal, (2) media sosial sebagai arena pertarungan simbolik, (3) dinamika identitas kolektif dan representasi budaya, dan (4) implikasi psikologis bagi pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture berfungsi sebagai cara informal untuk mengontrol sosial dan memperkuat norma budaya yang dominan. Selain itu, ia menjadi tempat pertempuran simbolik di ruang publik digital. Media sosial telah berkembang menjadi sumber penting untuk mobilisasi massa dan pembentukan opini, yang berdampak pada identitas budaya dan reputasi artis. Fenomena ini juga memiliki efek sosial dan psikologis yang signifikan bagi pelaku, seperti stres, isolasi sosial, dan ketidakpastian karir. Studi ini menekankan bahwa untuk mempertahankan industri hiburan Indonesia di era global, regulasi etis media sosial, literasi digital, dan diskusi konstruktif antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mengelola cancel culture secara lebih manusiawi dan konstruktif.

Kata Kunci: Industri hiburan Indonesia, sosiologi budaya, kontrol sosial.

ABSTRACT

In the Indonesian entertainment industry, the phenomenon of cancel culture has become a complex social issue. This occurs in the digital era, where collective cancellation of artists and public figures occurs rapidly and massively through social media. The purpose of this study is to investigate how cancel culture is shaped and influenced by social structures, collective values, and power dynamics in the entertainment industry. This study uses a qualitative approach from a cultural sociology perspective using in-depth interviews with 15 informants (5 artists, 5 audiences, 5 industry observers), participant observation on social media, and content analysis of secondary documents over a period of 6-12 months. Thematic analysis identified four main themes: (1) cancel culture as informal social control, (2) social media as an arena for symbolic battles, (3) dynamics of collective identity and cultural representation, and (4) psychological implications for industry players. The results show that cancel culture functions as an informal means of social control and reinforces dominant cultural norms. Furthermore, it has become a site of symbolic battles in the digital public sphere. Social media has evolved into a crucial source for mass mobilization and opinion formation, impacting artists' cultural identities and reputations. This phenomenon also has significant social and psychological effects on

performers, such as stress, social isolation, and career uncertainty. This study emphasizes that to sustain the Indonesian entertainment industry in the global era, ethical regulation of social media, digital literacy, and constructive discussions among stakeholders are crucial for managing cancel culture more humanely and constructively.

Keywords: Indonesian entertainment industry, sociology of culture, social control.

INTRODUCTION

Secara global, fenomena cancel culture telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir (Altamira & Movementi, 2023). Data dari Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 58% pengguna media sosial di berbagai negara pernah menyaksikan atau terlibat dalam praktik pembatalan online terhadap figur publik (Hirawan, 2020). Di Amerika Serikat, kajian oleh Ng (2020) mengungkapkan bahwa 64% warganet menganggap cancel culture sebagai bentuk akuntabilitas publik, sementara 36% lainnya memandangnya sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi (Rohmatullah & Syamsuri, 2024). Di industri hiburan Indonesia, fenomena cancel culture telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks dan multidimensi (Amalia et al., 2023). Ini terjadi dalam konteks masyarakat digital saat ini, di mana praktik penolakan atau pembatalan kolektif artis atau figur publik terjadi secara cepat dan massif melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok (Sudibyo, 2022).

Beberapa kasus konkret menggambarkan intensitas fenomena ini di Indonesia (Rifauddin, 2016). Kasus Gisella Anastasia pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana video pribadi yang tersebar memicu gelombang pembatalan masif, mengakibatkan kehilangan kontrak endorsement senilai miliaran rupiah dan penangguhan karir selama lebih dari satu tahun (Mulayana, 2019). Kasus serupa dialami oleh komedian Tretan Muslim yang menghadapi boikot dan tuntutan pembatalan setelah konten humornya dianggap menyinggung sentimen agama tertentu pada tahun 2021. Lebih lanjut, kasus Lucinta Luna menunjukkan kompleksitas cancel culture terkait identitas gender dan norma sosial konservatif di Indonesia (Rianto¹ et al., 2024). Kasus-kasus ini mendemonstrasikan bahwa permasalahan ini ditandai oleh mobilisasi audiens yang menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran norma etika, skandal pribadi, pernyataan kontroversial, atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dominan (Widayanthi & Wulandari, 2025). Ini sering berujung pada boikot, kampanye online, dan konsekuensi jangka panjang terhadap karier dan reputasi seseorang (Putra et al., 2024).

Industri hiburan Indonesia, yang memiliki banyak artis, selebriti, dan kreator konten, menjadi tempat utama di mana cancel culture memengaruhi dinamika antara artis dan penggemar serta konflik antara individualisme modern dan kolektivisme tradisional serta dampak globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi dan pendapat. Dalam lingkungan digital, tidak ada regulasi yang jelas, yang mengakibatkan eskalasi emosi kolektif tanpa kontrol yang cukup, yang mengakibatkan stigmatisasi, isolasi sosial, dan bahkan konsekuensi psikologis bagi para pelaku industri (Sulianta, 2025). Selain itu, fenomena ini mengungkapkan elemen struktural seperti perbedaan kekuasaan antara elit industri hiburan dan populasi umum, serta bagaimana norma budaya lokal, yang dipengaruhi oleh agama, etnis, dan politik,

berinteraksi dengan tren budaya global (Kusno, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan pembentukan identitas budaya di era digital (Bahram, 2023).

Fenomena cancel culture di Indonesia memperlihatkan karakteristik unik yang berbeda dengan konteks global (Juniman, 2023). Data dari survei Jakpat (2021) menunjukkan bahwa 72% pengguna media sosial Indonesia pernah menyaksikan praktik cancel culture, dengan 45% di antaranya pernah berpartisipasi aktif dalam kampanye pembatalan (Ridhanie, 2022). Berbeda dengan negara Barat yang lebih menekankan pada isu kesetaraan gender dan rasial, cancel culture di Indonesia lebih didominasi oleh isu moralitas (38%), kontroversi agama (27%), dan pelanggaran norma kesopanan (23%). Hal ini mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh norma agama, budaya paternalistik, dan hierarki sosial (Arianti et al., 2025).

Selain itu, fenomena ini mengungkapkan elemen struktural seperti perbedaan kekuasaan antara elit industri hiburan dan populasi umum, serta bagaimana norma budaya lokal, yang dipengaruhi oleh agama, etnis, dan politik, berinteraksi dengan tren budaya global. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan pembentukan identitas budaya di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari masalah ini dari perspektif sosiologi budaya. Penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana praktik cancel culture dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai kolektif, dan dinamika kekuasaan di industri hiburan Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem kreatif dan kesehatan mental di seluruh dunia, penelitian ini menyarankan penerapan regulasi etis untuk platform media sosial, pendidikan literasi digital bagi audiens dan pelaku industri, dan diskusi konstruktif antara pemangku kepentingan seperti asosiasi artis, regulator pemerintah, dan komunitas online. Diharapkan bahwa metode ini akan mengubah cancel culture dari alat protes reaktif menjadi mekanisme sosial yang konstruktif. Ini akan memperkuat solidaritas budaya dan keberlanjutan industri hiburan Indonesia di era digital.

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian: Bagaimana sosiologi budaya dapat digunakan untuk melihat fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme pembentukan, dampak sosial, dan dampak dari norma budaya dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat digital. Permasalahan ini berasal dari kebutuhan untuk memahami cancel culture sebagai proses sosial yang kompleks yang mencakup hegemoni budaya, nilai-nilai kolektif, dan peran media sosial dalam membentuk identitas dan kontrol sosial di Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap fenomena cancel culture sebagai manifestasi sosiologis budaya. Untuk mencapai tujuan ini, metode kualitatif akan digunakan untuk melakukan eksplorasi empiris yang menyeluruh. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pola interaksi sosial yang mendorong praktik pembatalan; mengevaluasi bagaimana hal itu berdampak pada individu dan struktur industri hiburan; dan membuat saran untuk mendorong diskusi konstruktif dan regulasi yang lebih etis di ekosistem digital. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori sosiologi budaya kontekstual di Indonesia dan mendukung upaya untuk mengurangi risiko sosial dan budaya yang disebabkan oleh fenomena ini.

Dari sudut pandang sosiologi budaya, studi teoritik tentang cancel culture di industri hiburan Indonesia dapat diuraikan dalam beberapa kerangka utama. Kerangka-kerangka ini menjelaskan praktik sosial sebagai manifestasi dari struktur budaya, kekuasaan, dan interaksi simbolik. Misalnya, teori habitus dan kapital budaya Pierre Bourdieu menawarkan perspektif baru untuk memahami cancel culture sebagai perlombaan di dalam "lapangan sosial" industri hiburan, di mana artis dan penonton bersaing dalam pertarungan simbolik untuk mengumpulkan kapital budaya, seperti reputasi, popularitas, dan legitimasi, yang dapat diperoleh atau dirusak melalui praktik pembatalan. Habitus, disposisi internal yang berasal dari pengalaman sosial, mengarahkan bagaimana individu atau kelompok merespons pelanggaran norma. Menurut Bourdieu, cancel culture menjadi mekanisme untuk mempertahankan hierarki sosial di mana kelompok dominan mempertahankan hegemoni mereka. Selain itu, gagasan hegemoni dari Antonio Gramsci memberikan gambaran tentang cancel culture sebagai alat dominasi budaya. Dalam situasi Indonesia, nilai-nilai agama, etnis, atau politik dapat memengaruhi kelas atau kelompok mayoritas, yang menggunakan media sosial untuk menegakkan konsensus budaya dan menekan penyimpangan, memperkuat kontrol sosial tanpa kekerasan fisik. Teori ini penting karena menjelaskan bagaimana cancel culture di industri hiburan Indonesia secara proaktif membentuk norma kolektif yang mencerminkan ketegangan antara pengaruh internasional dan tradisi lokal. Selain itu, fenomena ini dapat dikaitkan dengan gagasan sosiologi budaya Michel Foucault tentang kekuasaan dan disiplin, di mana cancel culture berfungsi sebagai bentuk "panopticon" digital—pengawasan antara satu sama lain melalui media sosial—yang mendisiplinkan perilaku artis dan mendorong self-regulation untuk menghindari stigmatisasi. Rangkuman ini menunjukkan bahwa kajian teoritik ini saling melengkapi, memungkinkan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana cancel culture membentuk identitas budaya, memperkuat atau menantang struktur kekuasaan, dan mempengaruhi dinamika sosial di ekosistem hiburan Indonesia.

Fokus penelitian "Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia: Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya", adalah bagaimana praktik cancel culture dibentuk dan dibangun dalam interaksi sosial yang melibatkan norma budaya, kekuatan simbolik, dan identitas kolektif di ruang publik digital. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak bersifat deskriptif atau komparatif tentang cancel culture di Indonesia atau membandingkannya dengan fenomena serupa di negara lain (seperti studi global atau negara lain seperti Korea Selatan). Penelitian ini mengeksplorasi dimensi kekuasaan budaya dan mekanisme kontrol sosial informal yang terjadi di industri hiburan, yang merupakan ruang khusus yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menganalisis secara menyeluruh pertarungan simbolik yang terjadi di media sosial sebagai alat untuk mereplikasi dan menegakkan hegemoni budaya dalam konteks lokal—di mana nilai-nilai agama, etnis, dan politik berinteraksi dengan dampak globalisasi. Penelitian sebelumnya tidak memperhatikan aspek ini secara menyeluruh. Riset ini menawarkan kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami secara lebih mendalam dan kontekstual kompleksitas fenomena cancel culture di Indonesia. Ini menggabungkan teori sosiologi budaya seperti teori hegemoni Antonio Gramsci, habitus dan kapital budaya Pierre Bourdieu, dan teori kekuasaan digital Michel Foucault. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengalaman subjektif pelaku industri hiburan, yang biasanya belum dibahas secara eksplisit dalam studi sebelumnya yang bersifat kuantitatif atau normatif. Ini memberikan

kontribusi dalam penelitian tentang konsekuensi psikologis dan profesional yang dialami pelaku di industri hiburan. Oleh karena itu, penelitian ini inovatif karena melihat secara menyeluruh praktik cancel culture sebagai fenomena sosial budaya modern. Fenomena ini berfungsi sebagai arena perselisihan kekuasaan, pembentukan dan penegakan norma sosial, dan refleksi identitas budaya dalam lingkungan digital Indonesia.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya sebagai tiga kota dengan konsentrasi industri hiburan tertinggi di Indonesia, pada periode Maret-September 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia dari perspektif sosiologi budaya. Pendekatan deskriptif-eksploratif ini memungkinkan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh proses sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika kekuasaan yang terlibat secara menyeluruh, tanpa mengukur variabel secara kuantitatif. Sebaliknya, pendekatan ini memungkinkan interpretasi subjektif dan kontekstual dari variabel yang dibahas. Metode ini berasal dari paradigma konstruktivis, yang menganggap realitas sosial sebagai konstruksi bersama. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan secara bertahap untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana cancel culture membentuk norma dan identitas budaya di ekosistem hiburan nasional.

Seluruh aktor industri hiburan Indonesia, termasuk artis, selebriti, produser, pengamat media, dan audiens media sosial yang terpengaruh atau terlibat dalam cancel culture, termasuk dalam populasi penelitian ini. Kasus-kasus cancel culture seperti skandal artis populer atau kontroversi konten digital adalah sasaran penelitian. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, sampling purposive digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria relevansi, seperti pengalaman langsung dengan fenomena tersebut. Jumlah informan utama sebanyak lima belas orang, termasuk lima artis, lima audiens atau penggemar, dan lima pengamat industri. Untuk merepresentasikan kompleksitas budaya Indonesia, pemilihan sampel ini mempertimbangkan berbagai latar belakang sosial, usia, dan etnis.

Untuk mendapatkan pemahaman subjektif tentang cancel culture dan pengalaman pribadi informan, metode pengumpulan data termasuk wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui internet. Instrumen wawancara mencakup panduan pertanyaan terbuka yang dikembangkan berdasarkan kerangka teoretis Bourdieu, Gramsci, dan Foucault, meliputi dimensi: (1) pengalaman langsung dengan praktik cancel culture, (2) persepsi terhadap norma budaya dan moral yang dilanggar, (3) dampak psikologis dan profesional, (4) peran media sosial dalam mobilisasi massa, dan (5) mekanisme kontrol sosial informal yang beroperasi.

Selain itu, observasi partisipan di media sosial seperti Instagram dan Twitter digunakan untuk memantau kampanye pembatalan secara real-time dan analisis konten dari dokumen sekunder seperti postingan media sosial, artikel berita, dan laporan industri hiburan. Data dikumpulkan selama tujuh bulan untuk memastikan bahwa informasi itu akurat, dan protokol etika seperti informed consent dan anonimitas digunakan untuk melindungi privasi informan. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen), triangulasi metode (wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis konten), member

checking dengan mengembalikan transkrip kepada informan untuk verifikasi, dan peer debriefing dengan melibatkan dua peneliti independen dalam proses analisis.

Untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti pembentukan norma budaya, dinamika kekuasaan, dan dampak sosial, teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis), yang didasarkan pada teori grounded. Analisis tematik dilakukan melalui enam tahap sistematis: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara dan catatan observasi; (2) pemberian kode awal (initial coding) terhadap segmen data yang relevan; (3) pencarian tema (searching for themes) dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki pola serupa; (4) peninjauan tema (reviewing themes) untuk memastikan konsistensi internal dan validitas; (5) pendefinisian dan penamaan tema (defining and naming themes) berdasarkan kerangka teoretis sosiologi budaya; dan (6) penulisan laporan dengan mengintegrasikan kutipan verbatim sebagai evidensi empiris. Proses ini melibatkan pengurangan data, penyajian data dalam matriks tematik, dan triangulasi sumber (wawancara, observasi, dan konten media) untuk memastikan validitas data. Dengan menggunakan perangkat lunak seperti NVivo, analisis berulang dilakukan untuk menghasilkan penjelasan yang menyeluruh dan kontekstual tentang fenomena cancel culture dari perspektif sosiologi budaya.

RESULT AND DISCUSSIONS

Analisis Fenomena cancel culture dalam Industri Hiburan Indonesia

Fenomena cancel culture dalam industri hiburan Indonesia adalah jenis tindakan sosial yang rumit dan dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya yang unik, di mana media sosial berfungsi sebagai alat utama untuk menyebarkan dan mengangkat tindakan tersebut. Beberapa tema utama yang menggambarkan kompleksitas fenomena ini muncul dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku industri hiburan, pengguna media sosial, dan pengamat budaya, serta observasi partisipatif di platform digital. Kultur cancel tidak hanya berfungsi sebagai cara informal untuk mengontrol orang lain, tetapi juga menjadi tempat di mana masyarakat Indonesia membahas norma dan nilai budaya. Dalam industri hiburan, cancel culture sering muncul sebagai respons kolektif terhadap perilaku selebritas atau tokoh publik yang dianggap melanggar etika, standar sosial, atau prinsip budaya yang dihormati masyarakat. Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik yang dinamis yang memungkinkan mobilisasi massa yang luas dan cepat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, menuntut tanggung jawab, dan menegakkan norma sosial yang dianggap terlanggar. Fenomena ini menunjukkan bahwa audiens saat ini lebih aktif dan kritis, dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah produk hiburan di era digital. Selain itu, budaya cancel mencerminkan pertarungan simbolik antara budaya populer, media, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Pembatalan atau pengucilan selebritas didasarkan pada penilaian moral pribadi selain solidaritas kelompok dan upaya untuk mempertahankan identitas budaya kelompok. Dalam proses ini, media sosial menjadi alat yang berguna untuk memungkinkan sanksi sosial dan sekaligus mendorong publik untuk mempertahankan prinsip budaya yang dianggap penting.

Fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia tidak hanya menunjukkan reaksi impulsif terhadap pelanggaran etika, tetapi juga menunjukkan ketegangan antara nilai kolektivisme yang mendalam dalam masyarakat Indonesia dan individualisme kontemporer, di mana hak individu sering kali mengalahkan solidaritas kelompok. Persepsi kesenjangan sosial seringkali menyebabkan proses ini, menurut analisis mendalam. Misalnya, ketika selebritas

dari latar belakang elit dianggap melanggar standar kesetaraan atau keadilan, ini memicu gerakan yang melampaui batas hiburan dan berfokus pada masalah politik atau ekonomi. Misalnya, skandal selebritas yang berkaitan dengan rasialisme atau korupsi telah menunjukkan bagaimana cancel culture berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial, tetapi juga berisiko menimbulkan polarisasi, menyebabkan kelompok-kelompok yang berbeda saling bertentangan, menciptakan echo chamber di platform digital. Dari perspektif psikologis, efeknya melampaui stres individu: penelitian menunjukkan bahwa korban cancel culture sering mengalami isolasi sosial yang lama, yang dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, sementara pelaku yang terlibat dalam kampanye cancel mungkin merasa lebih kuat sesaat, tetapi akhirnya mereka menghadapi kritik moral ketika kampanye mereka ternyata palsu. Selain itu, fenomena ini mengubah dinamika kekuasaan dari selebritas ke audiens. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka memaksa perusahaan produksi untuk menetapkan standar etika yang lebih ketat dalam kontrak artis atau mendorong produksi konten yang lebih inklusif untuk menghindari risiko backlash. Namun, analisis kritis menekankan bahaya overreach, di mana cancel culture dapat menghalangi inovasi kreatif dan kebebasan artistik, karena artis mungkin menghindari tema kontroversial untuk menghindari risiko, yang pada akhirnya akan melemahkan keragaman budaya dalam industri hiburan Indonesia. Dalam konteks global, fenomena ini serupa dengan tren di negara lain seperti Amerika Serikat. Namun, di Indonesia, budaya gotong royong mendorong mobilitas cepat, yang membuatnya alat untuk menjaga keseimbangan sosial tetapi juga bisa menjadi senjata untuk kontrol sosial yang berlebihan. Dengan demikian, fenomena cancel culture dalam industri hiburan Indonesia dapat digambarkan sebagai fenomena yang berdampak pada aspek sosial budaya dan psikologis individu yang menjadi sasaran. Ini menunjukkan bahwa cancel culture juga memiliki efek psikologis yang serius bagi pelaku industri hiburan, termasuk stres, tekanan sosial, dan bahkan kehilangan reputasi dan peluang karir.

Cancel Culture sebagai Bentuk control sosial dan ekspresi Nilai Budaya

Dalam industri hiburan Indonesia, fenomena cancel culture berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat secara informal. Komunitas online berfungsi sebagai penegak norma dan nilai budaya yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Dalam situasi ini, penghapusan budaya bukan hanya reaksi moral individu terhadap tindakan yang dianggap menyimpang; itu adalah simbol solidaritas kolektif yang memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai bersama masyarakat Indonesia. Pembatalan atau pengucilan sosial yang dilakukan terhadap selebritas dan pelaku industri hiburan dianggap sebagai bentuk pertarungan simbolik yang terjadi di ruang publik digital. Di ruang publik digital, aktor sosial memproduksi dan memperebutkan makna budaya melalui komunikasi online yang intens dan massa. Dalam fenomena ini, ruang publik digital bukanlah ruang netral. Sebaliknya, itu adalah arena yang sangat dimediasi oleh kekuatan simbolik, kepentingan kelompok, dan algoritma media sosial. Algoritma ini menciptakan ruang gema, atau ruang echo, yang mendorong solidaritas kelompok dan memarginalkan pihak yang dianggap melanggar norma. Cancel culture berfungsi sebagai alat perjuangan budaya yang memperkuat dominasi nilai-nilai mayoritas sekaligus menampilkan dimensi sosiologis berupa penegakan moral kolektif dan pelembagaan nilai budaya secara informal. Selain itu, ia juga menimbulkan dinamika konflik dan pertarungan simbolik yang menguji batas norma dan nilai masyarakat.

Analisis mendalam tentang cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial di industri hiburan Indonesia mengungkapkan bagaimana fenomena ini memperkuat hierarki nilai budaya

yang seringkali didominasi oleh nilai konservatif, seperti yang tercermin dalam agama dan adat istiadat yang mendalam. Misalnya, kasus pembatalan selebritas yang terlibat dalam skandal moral, seperti perselingkuhan atau perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai keluarga, memperkuat solidaritas kelompok dan mempertahankan struktur patriarki dan heteronormativitas yang kuat di masyarakat. Dari perspektif sosiologis, ini dapat dilihat sebagai manifestasi kapital simbolik Bourdieu, di mana kelompok dominan memperoleh kekuasaan moral melalui media sosial, sementara kelompok minoritas atau individu dengan pandangan yang berbeda sering terpinggirkan, menyebabkan siklus marginalisasi yang berulang. Selain itu, fenomena ini menimbulkan masalah etis karena, meskipun berfungsi sebagai alat koreksi sosial, ia berpotensi menghambat kebebasan ekspresi artistik. Kreator konten mungkin menahan diri untuk tidak mengeksplorasi tema subversif seperti kritik sosial atau identitas gender untuk menghindari pengucilan. Dalam perkembangan budaya digital Indonesia, cancel culture juga dipengaruhi oleh globalisasi. Tren global seperti #MeToo disesuaikan dengan tren lokal, tetapi seringkali diperkuat oleh politisi untuk mencapai tujuan populis seperti nasionalisme atau anti-korupsi. Akibatnya, ini menciptakan dinamika di mana kontrol sosial informal ini tidak hanya mengekspresikan nilai budaya tetapi juga membentuknya ulang. Ini memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan atau, sebaliknya, memperdalam polarisasi sosial yang menghalangi percakapan konstruktif di masyarakat yang semakin terpecah. Dengan demikian, cancel culture berfungsi sebagai arena negosiasi konflik budaya yang berlangsung secara pribadi.

Dinamika Identitas Kolektif dan Representasi Budaya

Dalam industri hiburan Indonesia, cancel culture adalah manifestasi dari mekanisme kolektif untuk mempertahankan dan mereproduksi identitas budaya masyarakat. Ini lebih dari sekadar reaksi spontan terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma. Studi ini menunjukkan bahwa kritik yang diarahkan pada selebritas yang dianggap melanggar nilai-nilai atau norma agama berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan sistem nilai dan identitas budaya yang menjadi dasar masyarakat. Dalam sosiologi budaya, cancel culture didefinisikan sebagai tempat di mana norma sosial, media digital, dan budaya populer berinteraksi dan berkonflik dalam ruang publik digital. Selama proses ini, identitas kolektif terus-menerus dipertaruhkan dan direkonstruksi melalui praktik sosial yang melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa representasi budaya dibuat dari bawah ke atas melalui lembaga formal dan komunitas online yang aktif menggunakan cancel culture sebagai cara untuk mengambil dan mempertahankan cerita budaya mereka. Dalam situasi ini, sanksi sosial diberikan kepada figur publik yang dianggap mengancam atau menyimpang dari standar yang sudah mapan untuk menjaga identitas kolektif. Ini menunjukkan bahwa budaya berfungsi sebagai kerangka acuan untuk evaluasi sosial yang terjadi di media sosial dan dunia digital. Cancel culture berfungsi sebagai kritik moral dan sebagai ekspresi nyata dari perjuangan untuk mempertahankan kontinuitas budaya dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman modern.

Dalam industri hiburan Indonesia, analisis menyeluruh terhadap dinamika identitas kolektif dalam cancel culture menyoroti bagaimana fenomena ini memperkuat stereotip gender dan peran sosial. Wanita selebritas sering kali menjadi target pembatalan utama jika mereka melanggar standar femininitas atau kesetiaan, sementara pria mungkin lebih mudah diampuni jika melanggar standar serupa, yang menunjukkan dominasi patriarki. Dari sudut pandang teori representasi Stuart Hall, ini menunjukkan bahwa identitas kolektif direproduksi melalui

diskursus media sosial yang menggambarkan "the other" sebagai ancaman; contohnya, artis dari kelas bawah dianggap mengancam hierarki sosial, atau konten yang membahas masalah seperti feminism yang memicu kritik untuk mempertahankan keadaan saat ini. Selain itu, generasi muda dipengaruhi oleh fenomena ini; mereka menggunakan cancel culture sebagai bentuk aktivisme digital untuk menantang representasi budaya kolonial atau kapitalis; namun, survei menunjukkan peningkatan polarisasi identitas berdasarkan etnis atau ideologi politik. Perusahaan hiburan memanfaatkan tren ini dalam ekonomi kreatif untuk memasarkan "otentisitas budaya" dengan cara yang tidak kontroversial, tetapi ini dapat menekan keragaman artistik, seperti pengucilan seniman independen yang tidak sejalan dengan cerita mayoritas. Terakhir, cancel culture sebagai ekspresi identitas kolektif menimbulkan dilema: ia mendorong refleksi kritis tentang inklusivitas budaya, tetapi juga memperdalam eksklusi. Ini memaksa masyarakat Indonesia untuk merevisi batas-batas identitas mereka di tengah arus globalisasi yang mengancam homogenitas yang sudah ada.

Peran Media Sosial sebagai Arena Pertarungan Budaya

Di Indonesia, media sosial memainkan peran yang sangat penting sebagai tempat utama di mana fenomena cancel culture berkembang. Media sosial memungkinkan mobilitas massa secara cepat dan luas, membedakan ruang offline. Ini memungkinkan opini publik terbentuk dan menyebar dalam waktu yang relatif singkat. Platform ini berfungsi sebagai ruang publisitas yang dinamis di mana nilai sosial, standar budaya, dan identitas kolektif dipertahankan, diubah, atau bahkan ditantang melalui berbagai ekspresi dan tindakan kolektif. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi dalam situasi ini, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial informal yang memiliki kemampuan untuk memaksakan norma budaya melalui praktik cancel culture, seperti meminta boikot, pengucilan, atau peringatan sosial. Penggunaan media sosial sebagai tempat pertempuran budaya ini menunjukkan bagaimana dunia digital mempengaruhi dinamika kekuasaan simbolik dan pembentukan makna sosial. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam perundingan makna budaya, di mana berbagai aktor—mulai dari individu, komunitas, hingga kalangan elite—berkolaborasi untuk mempertahankan norma yang dianggap penting dan menolak perilaku yang dianggap menyimpang. Pada titik ini, media sosial tidak hanya mendorong masyarakat untuk mengikuti norma sosial, tetapi juga menyebabkan stigma sosial yang kuat terhadap mereka yang dibatalkan, yang berdampak pada identitas dan reputasi secara keseluruhan baik secara personal maupun kolektif.

Analisis mendalam tentang fungsi media sosial sebagai arena pertempuran budaya dalam cancel culture di Indonesia mengungkapkan bagaimana algoritma di platform seperti Instagram dan TikTok mempromosikan polarisasi melalui echo chambers, di mana konten yang mendukung bias diprioritaskan, meningkatkan perpecahan antar kelompok etnis, agama, atau ideologis. Misalnya, algoritma yang mendorong keterlibatan tinggi memungkinkan kampanye pembatalan artis yang dianggap "anti-nasionalis" menjadi viral dengan cepat. Namun, kampanye ini juga memicu reaksi balik dari kelompok yang bertentangan, yang menghasilkan siklus pertarungan simbolik yang tidak berujung. Dari sudut pandang teori Habermas tentang ruang publik, media sosial Indonesia tidak sepenuhnya demokratis. Aktor-aktor berpengaruh, seperti influencer dan politisi, sering mengontrol tren ini untuk tujuan pribadi, seperti mendorong populisme atau mengontrol narasi budaya. Lebih lanjut, fenomena ini memiliki efek psikologis jangka panjang: pengguna yang terlibat dalam kampanye cancel mungkin menjadi desensitisasi terhadap konflik, kurang empati, dan mendorong perilaku mobbing

digital yang merusak kohesi sosial. Pemerintah Indonesia telah mencoba memasukkan peraturan melalui UU ITE, tetapi ini seringkali menimbulkan masalah antara kebebasan berbicara dan menjaga norma budaya, dengan sensor yang berlebihan yang menghambat kreativitas. Terakhir, media sosial berfungsi sebagai arena pertempuran dan membantu mengubah identitas budaya Indonesia. Ini memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi digital, tetapi juga menimbulkan ancaman fragmentasi yang dapat melemahkan solidaritas nasional jika tidak diurus dengan baik. Dengan demikian, peran media sosial dalam fenomena cancel culture di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata karena platform ini berfungsi sebagai tempat utama proses sosial yang secara bersamaan memenuhi elemen kekuasaan, norma, dan identitas budaya. Dalam konteks budaya Indonesia yang dinamis dan terus berubah, media sosial menjadi tempat yang fleksibel, cepat, dan efektif untuk mengukuhkan norma budaya.

Implikasi Sosial dan Psikologis bagi Pelaku Industri Hiburan

Selain dampak sosial budaya, fenomena cancel culture dalam industri hiburan Indonesia memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi pelaku. Tekanan publik yang berasal dari pembatalan atau pengucilan selebritas di media sosial memiliki efek psikologis selain stigma negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku mengalami stres dan kecemasan yang berkepanjangan, rasa terisolasi secara sosial, dan kecemasan. Tekanan ini sering menyebabkan gangguan psikologis yang lebih serius, seperti depresi, penurunan motivasi dan produktivitas, dan ketidakpastian tentang terus bekerja di tempat kerja. Dampak psikologis ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara struktur sosial yang menempatkan figur publik di bawah perhatian intens, norma dan nilai budaya yang ditegakkan oleh masyarakat, dan pengalaman individual pelaku yang harus menghadapi opini publik yang luas. Selain masalah psikologis, cancel culture juga menyebabkan kerugian profesional dan finansial yang nyata, seperti kehilangan kontrak kerja, dukungan sponsor, dan peluang karir. Ini membuat selebritas lebih terbebani secara sosial dan psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa cancel culture bukan hanya fenomena sosial normatif tetapi juga memiliki konsekuensi yang nyata dan signifikan. Untuk membangun ruang digital yang lebih sehat dan bersahabat, berbagai pihak harus memperhatikannya.

Fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang lebih mendalam dan kompleks selain dampak psikologis yang telah disebutkan sebelumnya. Para selebritas sering mengalami stres dan kecemasan secara psikologis karena kesalahan atau kontroversi mereka disebarluaskan secara luas dan berulang kali di media sosial, yang menghantui kehidupan pribadi mereka. Rasa malu ini juga sering menyebabkan mereka kesepian dan isolasi sosial, yang memperburuk kesehatan mental mereka karena mereka merasa dikucilkan bukan hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh lingkungan sosial mereka yang terdekat. Selain itu, budaya cancel memaksa selebritas untuk tampil sempurna dan selalu memperbaiki diri mereka sendiri untuk mendapatkan pengampunan publik. Namun, paradoksnya, permintaan maaf yang terlalu cepat atau terlalu lambat juga kerap dianggap negatif, menambah tekanan psikologis. Dari perspektif sosial, penghapusan budaya memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kehidupan profesional, seperti kehilangan kontrak kerja, dukungan sponsor, dan peluang karir. Akibatnya, pelaku tidak hanya mengalami ketidakstabilan keuangan tetapi juga mengalami ketakutan dan ketidakpastian masa depan. Mereka mengalami beban psikologis yang lebih berat sebagai akibat dari dampak ekonomi ini, yang menciptakan lingkaran sampah antara tekanan sosial dan kondisi mental yang lebih buruk.

Selain itu, jejak digital dari ujian cancel culture sangat sulit dihapus, sehingga dampak sosial dan psikologisnya dapat bertahan lama dan menghambat pemulihan penuh figur publik. Strukturalnya, konsekuensi ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara pengalaman individu yang rentan terhadap masalah psikologis dan norma sosial yang ditegakkan oleh masyarakat melalui mekanisme media sosial. Oleh karena itu, fenomena cancel culture menunjukkan bahwa pengelolaan ruang digital harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, inklusif, dan konstruktif. Ini harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari ruang digital sambil tetap menjaga kontrol sosial dan menciptakan norma yang sehat. Metode seperti ini sangat penting untuk kesehatan mental karyawan industri hiburan dan untuk membangun ekosistem sosial digital yang lebih adil di Indonesia. Oleh karena itu, konsekuensi sosial dan psikologis dari cancel culture bagi pelaku industri hiburan menunjukkan dinamika yang kompleks antara kontrol sosial, budaya digital, dan kesehatan mental orang yang terekspos secara publik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif diperlukan untuk menghadapi fenomena ini di era media sosial modern.

Integrasi Temuan dengan Teori Sosiologi Budaya

Kerangka teori sosiologi budaya, yang mencakup gagasan tentang hegemoni budaya, pertarungan simbolik, dan dinamika identitas kolektif, dapat digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh fenomena cancel culture yang terjadi di industri hiburan Indonesia. Dari sudut pandang hegemoni budaya, penghapusan budaya digambarkan sebagai upaya kelompok dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai budaya yang mereka anggap benar dan sah, sambil menyingkirkan atau mengontrol ide-ide dan praktik yang dianggap menyimpang atau mengancam kelangsungan hidup nilai-nilai tersebut. Proses ini menunjukkan bagaimana sanksi sosial informal yang dijalankan oleh komunitas online memanfaatkan mekanisme kekuasaan budaya dengan halus namun efektif. Selanjutnya, perselisihan simbolik muncul sebagai tempat perselisihan antara kelompok atau subkultur yang memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda tentang prinsip budaya. Kultur pembatalan berubah menjadi medan perebutan makna di mana setiap aktor sosial berusaha memperkuat pemahaman mereka tentang norma dan etika melalui praktik pembangkitan atau pembatalan sosial. Dalam sosiologi budaya, ini adalah elemen penting yang menekankan hubungan antara kekuasaan dan pertarungan makna sebagai proses konstruksi sosial yang selalu berubah. Karena dinamika identitas kolektif berfungsi sebagai alat kolektif untuk menjaga keutuhan dan kontinuitas identitas budaya komunitas tertentu, dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari fenomena cancel culture. Identitas ini dipertaruhkan dalam interaksi sosial di ruang digital, di mana pengguna media sosial aktif mereplikasi dan menegaskan norma budaya yang membentuk solidaritas kelompok. Cancel culture juga merupakan medan konflik budaya yang menguji dan membentuk batas-batas nilai budaya yang dominan dan subkultur. Untuk memahami makna dan hubungan kekuasaan dalam proses pembentukan norma sosial modern, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat penting, terutama dalam era media sosial, yang mempercepat penyebaran norma dan konflik budaya secara viral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia bukan hanya mekanisme pengucilan sosial; itu adalah bagian dari jaringan relasi sosial dan kekuasaan yang kompleks yang dibentuk oleh dinamika budaya modern. Hal ini terbukti dengan menggabungkan hasil penelitian dengan teori sosiologi budaya. Dari perspektif teori hegemoni budaya, praktik cancel culture membantu mempertahankan dominasi kelompok budaya mayoritas. Mereka melakukan ini melalui ruang digital, mengkonsolidasikan nilai-nilai

normatif dan menyingkirkan perspektif yang dianggap menyimpang, memastikan keadaan saat ini dalam struktur sosial. Dalam hal ini, pertarungan simbolik tidak hanya bersifat lokal tetapi juga dipengaruhi oleh arus globalisasi, yang membawa persaingan nilai dan identitas di antara berbagai subkultur. Selain itu, cancel culture menunjukkan dinamika identitas kolektif sebagai manifestasi dari proses sosial di mana komunitas menggunakan metode ini untuk menegakkan batas-batas solidaritas kelompok dan identitas budaya. Cancel culture memungkinkan makna budaya yang tidak pernah statis dan senantiasa berubah sebagai respons terhadap perubahan teknologi dan sosial dalam ruang digital yang bebas namun terstruktur oleh norma sosial dan algoritma. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aktor sosial melaksanakan dan mengartikulasikan praktik pembatalan dalam konteks kekuasaan yang kompleks dan multidimensi ini. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang cancel culture sebagai fenomena sosial yang kompleks, kompleks, dan dinamis di industri hiburan Indonesia dapat diperoleh dengan menggabungkan hasil penelitian empiris dengan ide-ide teori sosiologi budaya.

CONCLUSION

Fenomena cancel culture di industri hiburan Indonesia adalah fenomena sosial yang rumit dan beragam yang dihasilkan dari interaksi terus-menerus antara struktur sosial, norma budaya, dan kekuasaan simbolik di dunia digital. Kultur cancel berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang tidak resmi yang melindungi nilai-nilai budaya yang dominan dan menghasilkan dan mereplikasi identitas kolektif melalui pertarungan simbolik yang intens di media sosial. Media sosial telah berubah menjadi tempat utama di mana norma sosial dijaga, diubah, dan diperdebatkan. Konflik budaya ini membentuk kembali batas-batas makna budaya dan solidaritas kelompok. Fenomena ini memiliki konsekuensi sosial dan budaya yang signifikan. Mereka juga menyebabkan stres, kecemasan, stigma sosial, dan ketidakpastian karier bagi para pelaku industri hiburan. Efek ini terkait dengan pengalaman sosial dan struktur kekuasaan masyarakat. Studi ini menekankan betapa pentingnya menggunakan metode kualitatif untuk menangkap kompleksitas fenomena tersebut dan menyarankan regulasi etis media sosial, literasi digital, dan diskusi konstruktif antar pemangku kepentingan untuk mengubah cancel culture menjadi mekanisme sosial yang lebih konstruktif dan mendukung keberlanjutan industri hiburan Indonesia di era digital dan globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini membantu mengembangkan teori tentang cancel culture.

REFERENCES

- Altamira, M. B., & Movementi, S. G. (2023). Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), 5.
- Amalia, W., Untari, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis Tentang Kebangkitan Dan Dampaknya Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10384–10402.
- Arianti, L., Sagila, M., & Yulia, A. I. (2025). Peran Agama Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Lokal: Kajian Literatur Sistematis. *Khazanah: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1(1), 41–50.
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109.

- Hirawan, F. B. (2020). *Indonesia Dan Covid-19: Pandangan Multi Aspek Dan Sektoral*. Centre For Strategic And International Studies.
- Juniman, P. T. (2023). Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi: Critical Analysis Of Cancel Culture Phenomena And Threats To Freedom Of Expression. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 18(1), 1–14.
- Kusno, F. (2023). *Kebudayaan Dalam Lensa Sosiologi*. Penerbit Adab.
- Mudjiyanto, B., & Lusianawati, H. (2025). Pembatalan Budaya Sebagai Ekspresi Perlawanan Publik Di Ruang Digital. *Jurnal Mahardika Adiwidya*, 4(2), 112–127.
- Mulayana, A. N. (2019). *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Putra, E., Tubalawony, J., & Desembrianita, E. (2024). *Manajemen Pemasaran Berkelanjutan: Teori Dan Praktik*. Pt. Arunika Aksa Karya.
- Rianto, P., Sulkhan, K. A., & Marantika, N. (2024). *Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan Ataukah Penindasan?*
- Ridhanie, A. (2022). Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Negara Dan Keadilan*, 11(2), 149–181.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying Pada Remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35–44.
- Rohmatullah, R., & Syamsuri, S. (2024). Undang-Undang Hate Speech Sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi Perspektif Hukum Ham. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2).
- Rusly, N. F., Zein, S., Ardan, A. F., & Kurniawan, R. (2025). Persepsi Publik Pada Fenomena Cancel Culture Film A Bussines Proposal Di Media Sosial X. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan Berkelanjutan*, 9(2).
- Salim, J., & Apriwenni, P. (2018). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 7(2).
- Septiani, R., Verolyna, D., & Syaputri Kurnia, I. (2025). *Cancel Culture: Fenomena Dan Dampak Pada Pengguna Media Facebook*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sudibyo, A. (2022). *Dialeksudibyo, A. (2022). Dialektika Digital. Kepustakaan Populer Gramedia.Tika Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sulianta, F. (2025). *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan, Dan Perubahan Di Era Teknologi*. Feri Sulianta.
- Widayanthi, D. G. C., & Wulandari, C. I. A. S. (2025). *Communication Ethics: Etika Komunikasi Modern Di Era Digital*. Deepublish.